

## Pusat – Pinggiran Dunia Melayu di Nusantara: Dahulu dan Sekarang

### ABSTRACT

*“Melayu will never disappear from the earth” is an expression that is often pronounced by the Malay people when they talk about the challenge faced by their culture and civilization. Their confidence, in some parts, seems true, because since the word of Malay for the first time was known (in the Chinese oldest sources ca. from the 7<sup>th</sup> century A.D.), it has survived until now. Not only that, in its long historical experiences, the term of “Melayu” evolved perfectly, started from the name of a kingdom in Sumatra than became the name of race, culture and civilization which covered a huge region that is identical with Southeast Asia. The survival of the naming of Melayu, was not only supported by the relative intensive of research and publications that were carried out by the scholars, but also by the ability of the Malay people to defend their culture and civilization from continuous infiltration of other cultures and civilizations. It could be seen, for example, from the emergence of several centers of the Malay’s culture and civilization. The emergences of them have always been built through relationships with the peripheral areas. The center-periphery relationship could support the continuity of the Malay culture and civilization. The center could, in one time, decline and become peripheral area, and in the opposite the peripheral area could appear to the surface and become new center which dominates the social, political, economic and cultural life of the Malay world in general. This circle happened many times and colored the history of the Malay world. This article discusses the dynamic of several centers of the Malay culture and civilization in the longtime period and the center-periphery areas relationship. So that from this explanation could also be understood that it was a strategy of the Malay people to survive their culture and civilization in facing the strange culture and civilization.*

**Key words:** *the Malay culture, dynamic of the center-periphery relationship, and strategy for preserving the Malay identity.*



**Dr. Gusti Asnan** adalah Dosen di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UNAND (Universitas Andalas) Padang, Sumatera Barat. Lahir di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Drs.) di Jurusan Sejarah FS-UNAND Padang tahun 1986; dan menyelesaikan program Doktor (Dr.) di Fachbereich fuer Sozialwissenschaften Universitaet Bremen, Jerman tahun 1998 dengan menulis disertasi tentang *Trading and Shipping Activities: The West Coast of Sumatra, 1819-1906*. Beberapa buku dan artikelnya yang terbit pada beberapa waktu belakangan adalah *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat: Dari VOC Hingga Reformasi* (2006), *Kamus Sejarah Minangkabau* (2003), dan “Transportation in the West Coast of Sumatra in the 19th Century” dalam *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde* (IV, 2002). Untuk keperluan akademis, penulis dapat dihubungi dengan alamat e-mail: [gasnan@yahoo.com](mailto:gasnan@yahoo.com)

## PENGANTAR

Beberapa tahun terakhir ini, Melayu atau Dunia Melayu menjadi salah satu magnet yang menarik perhatian, tidak hanya perhatian para ilmuwan dan pemerhati sosial-budaya, tetapi juga kalangan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang mengambil tema Melayu atau Dunia Melayu telah dibuat dan diterbitkan. Dalam kurun waktu antara 1995 sampai dengan 2005, dalam sebuah penelitian pendahuluan yang dilakukan terhadap koleksi beberapa perpustakaan di Belanda dan Indonesia, ditemukan setidaknya 33 buku, serta 320 artikel (makalah) yang dibuat dengan mengambil Melayu dan Dunia Melayu (di Indonesia) sebagai tema utama pembahasannya.

Sesuatu yang menarik dari terbitnya tulisan-tulisan tersebut adalah tampilnya sejumlah besar penulis Indonesia yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengamat atau pemerhati sosial-budaya Melayu. Para penulis tersebut dengan tegas mengatakan bahwa mereka bukanlah ilmuwan/ahli Melayu, tidak memiliki latar-belakang akademis (ilmu) sejarah, sosiologi, antropologi atas sastra dan bahasa tentang kemelayuan, namun hanya memiliki minat dan keinginan yang tinggi untuk mengetahui serta mengungkapkan dinamika Melayu atau Dunia Melayu.

Dalam kurun waktu yang sama (1995-2005), juga telah banyak diselenggarakan diskusi dan seminar yang mengambil Melayu atau Dunia Melayu sebagai tema utamanya. Sesuatu yang menarik dari penyelenggaraan sejumlah diskusi atau seminar itu adalah diselenggarakannya diskusi atau seminar tersebut di daerah-daerah yang selama ini dinilai "tidak" atau "kurang" Melayunya. Bahkan ada sebuah kota (daerah) yang termasuk kategori ini yang pada satu tahun menyelenggarakan diskusi dan seminar seperti ini sebanyak dua kali, serta diiringi oleh kegiatan lain yang dinamakan Festival Budaya Melayu atau Festival Seni Melayu dan lain sebagainya.

Dalam periode 10 tahun itu juga bermunculan (atau diaktifkan kembali) berbagai pusat kajian, pusat penelitian, atau lembaga-lembaga lain yang sejenis, yang memberikan perhatian serius (memfokuskan kegiatannya) kepada Melayu atau Dunia Melayu. Sama dengan penyelenggaraan diskusi dan seminar di atas, sesuatu yang menarik dari kemunculan lembaga-lembaga ini adalah lokasi di mana ia ditubuhkan, umumnya juga terletak di daerah-daerah yang selama ini dikatakan "tidak" atau "kurang" Melayu.

Beberapa daerah yang dimaksud “tidak” atau “kurang” Melayu ini adalah Padang, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta dan Makassar (untuk menyebut sebagian saja). Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan munculnya kecenderungan baru di atas. *Pertama*, Melayu atau Dunia Melayu sejak beberapa waktu yang lalu mulai memasuki ranah emosional berbagai kelompok masyarakat di Nusantara; *kedua*, munculnya kesadaran baru dari kelompok-kelompok masyarakat atau daerah-daerah yang selama ini dikatakan “tidak” atau “kurang” Melayu untuk mengakui bahwa mereka sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dunia Melayu itu sendiri; serta *ketiga*, munculnya kesadaran baru dari orang-perorangan (kalangan akademisi atau bukan) di Indonesia untuk meneliti dan mengungkapkan keberadaan Dunia Melayu, lengkap dengan kebudayaan dan per-adabannya yang tidak begitu kental muatan politis (praktis)-nya.

Tidak dapat disangkal, terjadinya tiga perubahan di atas berkaitan erat dengan persoalan politis. Ada banyak persoalan politis dewasa ini yang menjadi pemicu perubahan tersebut, namun yang paling utama adalah munculnya gejala daerahisme yang sempit (dari dalam negeri: Indonesia) serta hantaman globalisasi (dari luar: negeri-negeri kapitalis) yang menginginkan lenyapnya serta terkuburnya berbagai lokalitas. Dari gejala ini, kembali ke Dunia Melayu yang relatif terbebas dari unsur-unsur politis, dan lebih kentara aspek kebudayaan dan peradabannya dirasa jalan yang paling aman. Apalagi, ikatan historis, sosiologis dan budaya kemelayuan itu – untuk sebagian besar daerah di Nusantara – jauh lebih mendalam (lama) bila dibandingkan dengan ikatan politis. Dengan berbagai latar belakang itu, untuk beberapa kelompok masyarakat dan daerah akhir-akhir ini, kebanggaan bermelayu dirasa lebih besar dan mendalam (atau dibesar-besarkan dan dikobar-kobarkan) dibandingkan dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini tidak akan mendiskusikan secara khusus mengenai kecenderungan baru bermelayu di atas. Tulisan ini hanya menjadikan kecenderungan tersebut sebagai pijakan untuk membahas perjalanan sejarah dan penulisan/pengkajian sejarah mengenai Melayu dan Dunia Melayu selama ini, serta beberapa waktu belakangan. Sebuah perjalanan dan sebuah fenomena yang telah melahirkan (menampilkan) kedinamisan pemahaman (dan gambaran) tentang Melayu atau Dunia Melayu, yang antara lain berupa pemahaman tentang lokasi, pemaknaan, serta batasan mengenai “asli Melayu”

atau “Melayu asli” dengan “tidak” atau “kurang” Melayu. Atau pemahaman akan “Melayu pusat” dan “Melayu pinggiran”, serta Melayu “hulu” dan Melayu “hilir”. Dengan pembahasan ini diharapkan muncul suatu gambaran mengenai “relief-relief” Melayu atau Dunia Melayu dalam sejarah, dan bagaimana “relief-relief” tersebut diungkapkan dalam penulisan/penelitian sejarah.

### **MELAYU DALAM SEJARAH DAN PENULISAN SEJARAH**

Kata atau nama “Melayu” telah dikenal dalam rentang waktu yang cukup lama. Setidaknya, nama itu telah menjadi bagian sejarah dalam kurun waktu lebih-kurang 1.400 tahun. Sesuatu yang menarik dari keberadaan nama atau penyebutan “Melayu” ini adalah terjadinya perubahan makna. Sejak pertama kali hadir dalam sejarah, nama itu ternyata telah mengalami perubahan makna beberapa kali. Setiap kali terjadi perubahan, maka muncul pembaharuan pemahaman dari makna awalnya atau sebelumnya. Penulisan sejarah memerankan peran yang besar dalam perubahan makna dan pemahaman tersebut.

Kata atau nama “Melayu” telah disebut-sebut pada tahun 644/645 M, dan muncul pertama kali dalam catatan (buku tamu) Kerajaan China. Menurut catatan itu, Melayu (ditulis “Moleyeo”) adalah nama sebuah kerajaan dan kerajaan itu telah mengirimkan utusannya ke negeri tersebut pada saat catatan itu dibuat (Wolter, 1967). Ada beberapa hal yang penting yang bisa disimpulkan dari catatan itu: *pertama*, Melayu adalah nama sebuah kerajaan; *kedua*, kerajaan tersebut adalah kerajaan yang berdaulat, sebab hanya kerajaan berdaulatlah yang bisa dan berwenang mengirim utusan (diplomatknya) ke negara lain (apalagi ke sebuah negara adikuasa) untuk *sowan*, yang biasanya juga bermakna adanya aliansi diplomatik atau politik; serta *ketiga*, “buku tamu” kerajaan China tersebut tidak menyebutkan lokasi dimana Melayu atau Kerajaan “Moleyeo” itu berada.

Penyebutan nama Melayu tertua kedua juga diperoleh dari tangan orang China, kali ini dari catatan seorang biksu China yang bernama I Tsing (De Haan, 1897; dan Schnittger, 1939). Menurut catatan sang biksu, dia sempat mengunjungi Kerajaan Melayu sebanyak dua kali, yakni pada tahun 671 M dan 685 M. Ada dua catatan penting dari *Memoire I Tsing* ini: sewaktu dia pertama kali mengunjungi Melayu, Melayu merupakan sebuah negara (kerajaan) yang merdeka (berdaulat); dan ketika kunjungannya yang kedua,

Melayu telah menjadi bagian dari (ditaklukan) Kerajaan Sriwijaya. Sekali lagi kita harus kecewa, sebab I Tsing juga tidak menyebutkan di mana lokasi Kerajaan Melayu atau Sriwijaya tersebut.

Sesuatu yang cukup menggembarakan dari petunjuk I Tsing itu adalah keterangannya yang mengatakan bahwa suatu hari pada saat dia berada di Melayu matahari tepat berada di atas kepalanya. Ini berarti matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Keterangan ini secara tidak langsung menyebut bahwa Kerajaan Melayu itu berada di suatu tempat yang dilalui garis khatulistiwa atau tidak begitu jauh jaraknya dari garis khatulistiwa. Menurut Herbert Koertert *et al.* (1979), bayang-bayang sebetulnya akan terinjak sampai jarak 3° ke utara atau ke selatan dari garis khatulistiwa. Yang menjadi masalah adalah ada banyak daerah yang dilalui oleh atau berlokasi tidak begitu jauh dari garis khatulistiwa. Namun bila asumsi sebagian ahli benar bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang, maka pusat Melayu berlokasi di daerah Sumatera bagian timur yang daerahnya dilalui garis khatulistiwa.

Informasi ketiga yang menyebut Melayu berasal dari sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Menurut prasasti tersebut, pada tahun 1197 *Æ*eaka atau 1275 M, Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari menyerang atau mengirim balatentaranya ke Kerajaan Melayu. Pengiriman balatentara tersebut ditujukan untuk mencegah kemungkinan atau membendung serangan Kerajaan Mongol yang pernah dipermalukan oleh Singosari. Penyerangan atau pengiriman balatentara itu disebut dengan *Pamalayu* atau Ekspedisi Malayu. Dari informasi ini juga bisa disimpulkan bahwa Melayu adalah juga nama sebuah kerajaan atau nama sebuah daerah (Schnittger, 1939).

Sama dengan informasi “buku tamu” Kerajaan China dan berita I Tsing, prasasti peninggalan Kerajaan Singosari di atas juga tidak memberikan keterangan dimana lokasi kerajaan atau daerah Melayu tersebut. Namun bila dikaitkan dengan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan prasasti tersebut, seperti peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan Ekspedisi *Pamalayu*, terutama dalam bentuk arca dan batu bersurat lainnya, serta historiografi tradisional di daerah pedalaman bagian tengah pulau Sumatera (Jambi hulu dan kawasan selatan Minangkabau), maka bisa dikatakan bahwa kerajaan atau daerah Melayu itu berlokasi di kawasan Jambi hulu atau bagian selatan Minangkabau (Amran, 1980).

Kalau kesimpulan-kesimpulan di atas bisa diterima maka dapat dikatakan bahwa untuk kurun waktu yang cukup lama, dalam rentang waktu sekitar 600-700 tahun, pada masa sebelum kedatangan bangsa Barat, Melayu adalah nama sebuah kerajaan yang berdaulat, nama daerah atau wilayah taklukan, atau hanya nama sebuah daerah semata. Dan tidak ada informasi yang tegas yang mengatakan dimana posisi atau letak Melayu tersebut.

Sebuah perubahan cukup penting terjadi pada saat hadirnya bangsa Barat di kawasan ini. Sumber-sumber atau karya-karya sejarah yang dibuat semenjak abad ke-16 (baik dibuat oleh orang Eropa atau bumiputera), disamping masih menyebut adanya Melayu, sekaligus memberikan informasi atau makna yang jauh lebih bervariasi tentang Melayu itu. Catatan perjalanan Tome Pires yang dibuat antara tahun 1512-1515 dan diterjemahkan serta diedit oleh Armando Cortesao, misalnya, mengatakan bahwa "Melayu" adalah nama sebuah daerah (*terra*), yang disebutnya *Terra de Tana Malaio*. Dari keterangan itu bisa dikatakan bahwa pada saat catatan tersebut dibuat, Melayu tidak lagi berupa sebuah kerajaan, ia hanya sebuah *terra*, dan ini menurut Tome Pires memiliki level dibawah kerajaan yang dinamakannya *reinos*. Namun dua hal yang paling penting dari catatan Tome Pires ini adalah: *pertama*, adanya informasi tentang lokasi daerah Melayu tersebut yang dikatakannya berada di bagian selatan Palembang; dan *kedua*, Parameswara (disebut Pires dengan *Paramiçura*), yaitu pendiri Malaka berasal dari daerah ini (Cortesao, 1967).

Informasi dari Tome Pires ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh pegawai atau penulis catatan harian *fetoria* Portugis di Malaka, terutama catatan-catatan yang dibuat pada hari-hari pertama mereka menguasai kota bandar itu. Salah satu diantara catatan tersebut dibuat oleh Rui de Britto. Dalam salah satu catatan yang dibuat pada tahun 1514, Rui de Britto mengatakan bahwa pelaut atau saudagar *Tana Melayo* telah datang dan aktif berniaga di Malaka sejak waktu yang lama. *Tana Melayo* tersebut dikatakan oleh Rui de Britto berlokasi tidak jauh dari *Tana Palembang*. Nenek moyang pendiri (raja) Malaka berasal dari daerah ini (Joustra, 1926).

Sumber-sumber yang dibuat orang Eropa pada abad ke-17 dan 18 M masih tetap menyebutkan bahwa "negeri asal" Melayu itu adalah Sumatera (pantai timur bagian tengah atau bagian selatan) dan kemudian menyebar ke Tanah Semenanjung. Tiga diantara penulis tersebut adalah Petrus van der Worm, Valentijn dan W. Marsden (*ENI*, 1917).

“Penemuan” orang-orang Eropa ini nampaknya merupakan awal baru dari penamaan dan pemahaman tentang Melayu. Sejak saat itu Melayu mulai diidentikkan dengan Kerajaan Malaka khususnya dan Tanah Semenanjung Malaysia pada umumnya. Kebetulan atau tidak, pada saat menglobalnya pengidentikkan Melayu dengan Malaka dan Tanah Semenanjung tersebut lahir pula karya-karya orang setempat, seperti karya Tun Seri Lanang yang menegaskan pengidentikkan Melayu dengan Tanah Semenanjung (Situmorang & Teeuw, 1952; dan Shellabear 1995). “Penemuan” orang-orang Eropa tersebut kemudian melebarkan makna Melayu menjadi penamaan sebuah wilayah dan sekumpulan besar orang yang mendiami daerah tersebut (Tanah Semenanjung) dan juga sebagian besar Sumatera (terutama bagian timurnya).

Minat peneliti Eropa kepada ilmu bahasa dan ilmu bangsa-bangsa (antropologi) di kawasan serantau ini sejak abad ke-17 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19, juga turut mengubah makna Melayu. Pada kurun waktu itu, Melayu juga telah mulai difahami sebagai sebuah rumpun atau sub-rumpun bahasa, yakni Bahasa Melayu atau juga Melayu Austronesia. Seiring dengan itu, seperti yang disebut di atas, Melayu juga sudah difahami sebagai sebuah ras atau sub-ras atau bangsa, yakni Ras Melayu yang sering dikatakan terdiri dari dua kelompok utama: Palaeo Melanesoid dan Deutero Melanesoid, serta Bangsa Melayu dengan berbagai sub-ras, seperti Melayu Semenanjung, Melayu Deli, Melayu Riau, Melayu Minangkabau, Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Kalimantan, dan sebagainya (Belwood, 1980; Wagner, 1988; dan Putten & Al Azhar 1995).

Pengidentikkan yang dipopulerkan oleh bangsa Eropa di atas kemudian diterima sebagai sebuah realitas sejarah. Sebagian besar orang Malaysia (bumiputera) pun akhirnya menjadikan (menamakan) negeri mereka dengan negeri Melayu dan diri (kelompok masyarakat) mereka sebagai orang (bangsa) Melayu. Pengidentikkan ini – dengan berbagai pengalaman historis yang tragis atau harmonis – kemudian menjadi salah satu identitas terpenting bagi bangsa Malaysia. Melayu kemudian dijadikan sebagai simbol kebangkitan melawan penjajahan dan simbol bagi penegakkan negara-bangsa Malaysia. Dalam konteks ini Melayu telah memiliki makna politik.

## **PUSAT - PINGGIRAN DUNIA MELAYU DI NUSANTARA**

Malaysia memang bersungguh-sungguh dalam gerakan “Melayu-nisasi” negerinya. Unsur-unsur kebudayaannya diarahkan

mengikuti alur Melayu, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli kebudayaan. Unsur bahasa, berpakaian, tradisi dan religi, serta organisasi sosial merupakan empat unsur kebudayaan Melayu yang mereka aktualkan dan pertahankan dengan kesungguhan yang tinggi, sehingga tetap menampilkan “kekentalan” kemelayuannya. Malaysia bahkan mempertahankan empat unsur utama kebudayaan ini dengan kuat yang kadang-kadang terkesan berlebihan, misalnya menguatkan pemakaian atau praktek aspek-aspek ini lewat undang-undang.

Upaya yang sungguh-sungguh di atas menyebabkan lahirnya pandangan, atau bahkan pemahaman baru, bahwa Malaysia adalah “Melayu asli” atau “asli Melayu”. Pemahaman tersebut telah terpatri di rantau Nusantara ini pada tahun-tahun 1960-an dan 1970-an. Sedangkan daerah-daerah lain di kawasan ini, dimana unsur-unsur kebudayaan Melayu itu juga dipraktekkan, kemudian difahami sebagai kawasan yang “tidak” atau “kurang” Melayu. Daerah-daerah yang disebut terakhir ini termasuk sebagian besar daerah yang menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Munculnya pemahaman bahwa sebagian besar daerah yang “kurang” Melayu tersebut berada di Indonesia, sebetulnya juga disebabkan oleh “kesalahan” orang/pemerintah Indonesia pada umumnya dan daerah-daerah yang bersangkutan pada khususnya. Untuk waktu lama, terutama segera setelah proklamasi kemerdekaan hingga dasawarsa 1960-an, Indonesia seakan-akan bersifat “munafik” terhadap konsensus yang telah dibuatnya dan disepakatinya. Pada satu sisi Indonesia, misalnya, mengatakan bahwa pembentuk utama bahasa nasionalnya adalah Bahasa Melayu, yang kemudian ditambah dengan bahasa-bahasa yang lain (bahasa daerah atau bahasa asing). Namun dalam kenyataannya, sejak proklamasi tahun 1945, pengayaan Bahasa Indonesia kurang (atau tidak) mengutamakan penyerapan dari Bahasa Melayu (Hamka, 2006a dan 2006b). Sikap munafik ini kemudian ditambah lagi dengan berbagai “serangan” dari politisi dan juga pengamat sosial-budaya (dengan mengatasnamakan semangat kebangsaan) pada dekade 1960-an yang mengatakan berbagai aspek kebudayaan Melayu feodal atau aristokratis dan kurang transparan. Karena “kebijakan nasional” ini, berbagai daerah yang sesungguhnya bagian tidak terpisahkan dari Dunia Melayu atau mempunyai hubungan langsung dengan dunia Melayu (seperti Sumatera Timur, Riau, Jambi, Palembang dan Kalimantan Barat) tidak bisa mengembangkan kemelayuannya.

Ada banyak contoh lain yang menguatkan proses penghilangan atau pemunduran kemelayuan ini. Revolusi sosial di Sumatera Timur pada periode perang kemerdekaan, misalnya, membuat sebagian anggota masyarakat di sana pada waktu itu enggan mengatakan diri mereka sebagai “Melayu”, atau setidaknya mencoba menghilangkan identitas Melayunya. Agitasi politik *ganyang* Malaysia yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an – sampai batas-batas tertentu – juga membuat beberapa daerah di Indonesia, yang sesungguhnya bagian tidak terpisahkan dari Dunia Melayu, juga enggan menyuarakan kemelayuannya atau menonjolkan identitas Melayunya.

Fenomena di atas akhirnya membuat Melayu di Indoensia hanya bagian dari sebuah dunia yang terasa ada namun terungkap tidak. Sebuah fenomena yang ironis, apalagi bila diterima tafsiran yang mengatakan bahwa asal-muasal Melayu tersebut, apakah sebuah kerajaan atau sebuah daerah, sesungguhnya berada di Indonesia dan berkembang di Indonesia.

#### **PUSAT - PINGGIRAN DUNIA MELAYU INDONESIA**

Walaupun kebanggaan bermelayu seakan-akan dihilangkan oleh pemerintah atau warga RI (Republik Indonesia) di masa lalu, ternyata sejak dekade 1970-an (sejak pulihnya hubungan diplomtik RI dengan Malaysia), Jakarta mulai memberikan “apresiasi” kepada Dunia Melayu. Berbagai festival atau pertunjukan kesenian yang membawa-serta kata-kata Melayu mulai diizinkan, bahkan digalakkan. Pada waktu itu, terutama sekali sejak tahun-tahun 1980-an, berbagai daerah menyelenggarakan Festival Budaya Melayu, Pekan Budaya Melayu, Festival Seni Melayu, bahkan Kongres Kebudayaan Melayu atau seminar yang membawa-bawa nama Melayu. Berbagai simbol kebudayaan dan peradaban Melayu juga mulai diberi kesempatan tampil kepermukaan. Bahkan berbagai peninggalan arkeologis dan historis yang berhubungan dengan Melayu di masa lampau diberi perhatian khusus.

Ketika Jakarta meluncurkan proyek inventarisasi kebudayaan Indonesia, daerah-daerah yang kental aroma Melayunya selalu juga mendapat bagian. Riau (sewaktu masih terdiri dari Riau Daratan dan Kepulauan) adalah salah satu daerah yang selalu mendapatkan “proyek” serta memanfaatkan banyak kesempatan yang diulurkan Jakarta ini. Karena itu terbitlah buku *Sejarah Riau* (Muchtart Lutfi ed., 1977); *Sejarah Daerah Riau* (1982); *Sistem Ekonomi Tradisional*

*Propinsi Riau* (1982); dan *Adat-Istiadat Daerah Riau* (1984); serta banyak tulisan dan buku lainnya, yang umumnya diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Riau adalah salah satu, atau satu-satunya, daerah yang mendapat perhatian atau diberi kesempatan begitu besar oleh Jakarta; dan Riau adalah salah satu, atau satu-satunya, daerah yang merespons peluang yang diberikan oleh Jakarta itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu sejak tahun 1980-an terlihat kegairahan bermelayu yang luar biasa di Riau. Seperti yang disebut di atas, berbagai acara dan kegiatan untuk membumikan (kembali) Melayu dilaksanakan di daerah itu. Di samping berbagai aktivitas yang disebutkan di atas, sejumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan “re-Melayunisasi” Riau itu – seperti pembuatan bangunan-bangunan pemerintah dengan arsitektur Melayu, pengenalan pakaian Melayu, pembiasaan penggunaan tradisi penghantaran berbagai acara yang bernuansakan Melayu, serta menggalakkan ilmuwan daerah dan pemerhati sosial-budaya daerah untuk lebih memberikan perhatian kepada khazanah serta dinamika kebudayaan dan peradaban Melayu. Tidak ketinggalan juga diselenggarakan berbagai seminar (nasional atau internasional) tentang Melayu dan Dunia Melayu atau penjalinan hubungan ekonomi (dan juga budaya serta pariwisata) dengan Singapura dan Malaysia lewat program SIJORI (Singapura, Johor, Riau) misalnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa respons Riau sama dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia di masa silam.

Hasil dari berbagai gerakan di atas akhirnya menghantarkan Riau sebagai sebuah daerah yang difahami sebagai pusatnya Melayu di Indonesia. Pemahaman ini ternyata sejalan dengan program pemerintah daerah Riau yang menginginkan daerahnya sebagai pusat Melayu. Vivienne Wee (2002) menyebut bahwa pada awal tahun 2000-an, sebagian besar warga Indonesia hampir mengidentikkan Melayu dengan Riau. Dan gejolak politik/ekonomi di Riau pada penghujung tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, yang melahirkan gagasan Riau Merdeka, Riau Berdaulat atau tuntutan keseimbangan keuangan bagi daerahnya, oleh beberapa kalangan dikait-kaitkan dengan hasil dari proses “re-Melayunisasi” Riau yang cukup intens sejak tahun-tahun terakhir 1970-an itu.

Kisah sukses Riau “memelayukan” dirinya ternyata menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain, yang sebelumnya juga pernah disebut sebagai daerah kunci Melayu, untuk mengaktualkan kembali

kemelayuan mereka. Muncul pulalah berbagai acara dengan mengambil tema atau mengkaitkan temanya dengan kebudayaan dan peradaban Melayu. Namun, seperti yang disebut di bagian awal tulisan ini, gerakan dari daerah-daerah lain tersebut baru mulai serius dilaksanakan sejak tahun 1990-an. Akibatnya, pemahaman masyarakat luas kepadanya relatif kurang bila dibandingkan dengan Riau. Akibatnya pula, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, daerah-daerah yang melakukan gerakan “re-Melayunisasi” terakhir ini sering difahami sebagai daerah pinggiran dari Dunia Melayu Indonesia.

Seakan-akan tidak terpengaruh oleh pemahaman masyarakat luas, kegairahan bermelayu di Indonesia akhir-akhir ini nampaknya semakin menjadi-jadi. Kegairahan itu tidak hanya terjadi pada level yang lebih tinggi, seperti pada level provinsi semata, tetapi juga pada tingkat kabupaten atau kota. Ini adalah sebuah fenomena yang pantas diapresiasi, sekaligus menarik untuk dicermati.

Munculnya pemahaman atau penerimaan masyarakat akan konsep Melayu pusat dan Melayu pinggiran, atau Melayu Hulu dengan Melayu Hilir (Pesisir) juga merupakan sebuah fenomena aktual kita akhir-akhir ini. Tanpa mengabaikan gejala yang sama, yang terjadi di daerah lain, adalah sangat menarik mencermati perkembangan konsep ini di daerah Riau. Nampak-nya persoalan ini telah menjadi bagian dari diskursus intelektual di Riau sejak dua dekade yang lalu. Tepatnya sejak gerakan “re-Melayunisasi” Riau tengah menjadi salah satu agenda utama daerah ini. Gerakan itu ternyata dilaksanakan secara tidak atau kurang seimbang serta menghasilkan ketidakseimbangan di daerah ini.

Dari diskursus yang berkembang di daerah tersebut diketahui bahwa Dunia Melayu Riau (terutama sebagai bagian dari proses “re-Melayunisasi” atau hasil dari proses tersebut), juga terdiri dari dua daerah utama: kawasan pusat dan pinggiran atau kawasan hulu dan hilir (pesisir). Daerah pusat atau hulu dicirikan berada di pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai pembangunan dilaksanakan dan berbagai kemudahan tersedia di daerah pusat atau hulu ini. Sebaliknya, daerah pinggiran atau hilir (pesisir) berada di pelosok dan kawasan-kawasan terpencil. Berbagai keterbatasan dalam infrastruktur dan fasilitas sosial-ekonomi mengakrabinya (Yusuf, 2006).

Berbekal pengalaman tersebut, maka ilmuwan (terutama pengamat sosial-budaya Riau) menginginkan agar perhatian yang sama juga diarahkan ke kawasan pinggiran atau hilir (pesisir) ini.

Gerakan kembali ke kawasan hilir (pesisir) ini pantas dilaksanakan, karena kemiskinan dan berbagai kekurangan yang dimiliki kawasan pinggiran atau hilir (pesisir) harus diatasi sehingga lahir sebuah potret Melayu yang seutuhnya, yang tidak lagi memantulkan dua wajah yang berbeda (bertolakbelakang): daerah pusat (hulu) bergelimang kemegahan dan kemudahan di satu sisi, dengan kawasan pinggiran atau hilir (pesisir) yang tidak pernah lepas dari berbagai kekurangan di sisi lain. Sejatinya, penyeimbangan itu adalah tujuan akhir dari gerakan penubuhan kebudayaan dan peradaban Melayu, tidak hanya di Riau tetapi juga di kawasan Nusantara ini.

### **AKHIRUL KALAM**

“Melayu” adalah sebuah penamaan dan konsep yang memiliki sejarah yang panjang serta menarik. Berbagai perubahan telah menjadi bagian dari perjalanannya. Berawal dari nama sebuah kerajaan, dalam rentang waktu yang panjang, Melayu akhirnya memiliki banyak makna. Melayu pun akhirnya juga memasuki ranah politik dan emosional warga.

Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap penamaan dan konsep Melayu tersebut sesungguhnya juga sebuah relief-relief peta Dunia Melayu yang dilukis oleh masyarakat luas pada umumnya dan ilmuwan atau pengamat sosial-budaya Melayu pada khususnya. Peta Melayu atau Dunia Melayu seperti ini adalah sebuah fenomena yang menarik dari keunikan Melayu atau Dunia Melayu itu sendiri. Berdasarkan peta tersebut terlihat dengan nyata bahwa Melayu adalah sebuah dunia yang dinamis. Kedinamisan ini – nampaknya – akan tetap menjadi bagian dari Dunia Melayu di masa-masa yang akan datang.

Sesuatu yang nampaknya selalu hadir dalam perjalanan sejarah Melayu dan menghiasi lembaran penulisan sejarahnya, terutama sejak Melayu juga memiliki makna politik dan ekonomi, adalah hadirnya konsep Melayu pusat dan pinggiran, atau Melayu hulu dan hilir. Didukung oleh kedinamisan Dunia Melayu itu sendiri, nampaknya konsep-konsep ini akan tetap mewarnai alam Melayu untuk beberapa waktu ke depan. Kegairahan ber“re-Malayunisasi” yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, nampaknya juga memiliki tujuan untuk menubuhkan atau mengekalkan konsep tersebut.

Sebuah pengamatan dari apa yang dilakukan beberapa daerah ber“re-Malayunisasi” tersebut bisa membuktikan pernyataan ini. “Cita-cita” Riau untuk menjadikan daerahnya sebagai “pusat”

Melayu di kawasan serantau ini, sejak beberapa waktu yang lalu, mulai digugat Kepulauan Riau yang merasa lebih Melayu dari Riau (Daratan). Kemudian, pada awal tahun 2007, Pemerintah Daerah Indragiri Hulu mencanangkakan pula daerahnya sebagai pusat Melayu di daerah Riau, dan ide ini tentu tidak akan “didiamkan” saja oleh daerah lain yang juga merasa diri (daerah) mereka lebih Melayu dari Indragiri. Daerah lain di luar Riau, seperti di Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan lain sebagainya juga melakukan hal yang sama. Demikianlah selanjutnya, gerakan “re-Melayunisasi” ini akan tetap bergulir.

Sejauh mana hasilnya, waktulah yang akan menentukan. Namun sesuatu yang dapat dipastikan, geliat gerakan tersebut disamping menandakan kedinamisan Melayu juga mengisyaratkan bahwa, sebagaimana kononnya diucapkan oleh Hang Tuah, sang wira dalam epik Dunia Melayu, “*Tak kan Melayu hilang di dunia*”, atau Melayu nampaknya tak kan hilang dari bumi ini.

## Daftar Pustaka

- Amran, Rusli. (1980). *Sumatera Barat: Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Belwood, P. (1967). *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Sydney: Academic Press.
- Corteseo, Armando. (1967). *The Summa Oriental of Tome Pires*. (2nd ed.) Nendel/Leichtenstein: Kraus Reprint Ltd., 2nd Edition.
- De Haan, F. (1897). “Naar Midden Sumatra 1684” dalam *Tijdschrift van Bataviach Genootschaft*, XXXIX.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1982a). *Sejarah Daerah Riau*. Jakarta: Proyek inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1982b). *Sistem Ekonomi Tradisional Propinsi Riau*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1984). *Adat-Istiadat Daerah Riau*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- ENI [*Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*], Vol.I. ‘s-Gravenhage-Leide: Martinus Nijhoff-E.J. Brill, 1917.
- Hamka. (2006a). “Kebudayaan Daerah” dalam Gusti Asnan [ed.]. *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah: Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an*. Padang: Citra Budaya, hlm.137-148.

- Hamka. (2006b). "Tinjaualah Sejarah (Penulisan Sejarah) Kembali" dalam Gusti Asnan [ed.]. *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah: Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an*. Padang: Citra Budaya, hlm.191-195.
- Joustra, H. (1926). *Minangkabau: Overzicht van het Land, Geschiedenis en Volk*. Leiden: Drukkerij Louis H. Becherer.
- Koettert, Herbert et al. [eds.]. (1979). *Indonesien: Geographie, Geschichte, Kultur, Religion, Staat, Gesellschaft, Bildungswesen, Politik, Wirtschaft*. Tuebingen & Basel: Horst Erdmann Verslag.
- Lutfi, Muchtar [ed.]. (1977). *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Percetakan Riau.
- Marsden, William. (1986). *The History of Sumatra*. Singapore: Oxford University Press, edisi pertama tahun 1783.
- Putten, Jan van der & Al Azhar. (1995). *Di Dalam Berkekalan Persahabatan: In Everlasting Friendship, Letter from Raja Ali Haji*. Leiden: Dept. of Languages and Cultures of South-East Asia and Oceania.
- Schnittger, F.M. (1939). *Forgoten Kingdom in Sumatra*. Leiden: Wolter.
- Shellabear, W.G. (1995). *Sejarah Melayu: Siri Kajian Sastera*. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti Sdn.Bhd.
- Situmorang, T.D. & A. Teeuw. (1952). *Sedjarah Melaju: Menurut Terbitan Abdullah (Ibn Abdulkadir Munsji)*. Djakarta: Djambatan.
- Wagner, Wilfried. (1988). *Strukturwandel im Pazifischen Raum*. Bremen. Lit Verlag.
- Wee, Vivienne. (2002). "Ethno-Nationalism in Process: Etnicity, Avatism and Indigenism in Riau, Indonesia" dalam *The Pacific Review*, Vol.15, No.4, hlm.497-516.
- Wolter, O.W. (1967). *Early Indonesia Commerce: A Study of the Origin of Sriwijaya*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Yusuf, Yusmar. (2006). *Melayu Juwita (Renjis Riau Sebingkai Perisa)*. Jakarta: Wedatama Widya Satra.